

## BPK Catat Kerugian Negara Rp 4,8 M

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya ada 69 temuan Badan Pemeriksa Keuangan soal APBD DKI pada 2011 Jakarta bermasalah, dan menimbulkan potensi korupsi.

"Temuan itu mengarah pada indikasi kerugian negara, penyalahgunaan wewenang, dan penanganan aset," ujar peneliti ICW Apung Widadi pada Sarasehan Jakarta "Kemana APBD DKI Mengalir?" di Jokowi Centre, Jakarta, Minggu (24/6).

Menurut Apung, dari temuan tersebut

modus penyelewengan APBD DKI beragam. Satu di antaranya adalah menciptakan program yang sengaja dibesarkan, tapi sedikit memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dari data BPK tadi, setidaknya temuan yang berindikasi pada kerugian negara mencapai Rp 4,8 miliar. Sedang yang berpotensi merugikan negara mencapai Rp 2,44 miliar. Pendapatan Asli Daerah yang belum masuk kas daerah mencapai Rp 7,2 miliar. Sedang dari pendapatan titik-titik

reklame sampai Rp 22,9 miliar.

Apung mengaku kecewa ketika ICW ingin mendapat informasi itu langsung dari Pemprov DKI, pejabat sumber informasi tertutup. Ketika informasi yang ingin ditanyakan menyoal alokasi dana hibah dan bantuan sosial senilai Rp 1,3 triliun. "Pejabat informasi daerah tidak mau menerima kami. Kami dipingpong ke sana kemari. Sore hari mereka konpers seolah-olah sudah kasih data ke ICW," tukas Apung. (tribunnews.com)